



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya seoptimal mungkin untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN serta akuntabel. Hal tersebut tentunya akan berproses sesuai perkembangan dan tuntutan untuk membangun demokrasi di ranah lokal.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (Clean Government) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan regulasi ini BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut telah berupaya untuk menyusun Laporan Kinerja untuk tahun 2019. Paradigma ini merupakan satu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

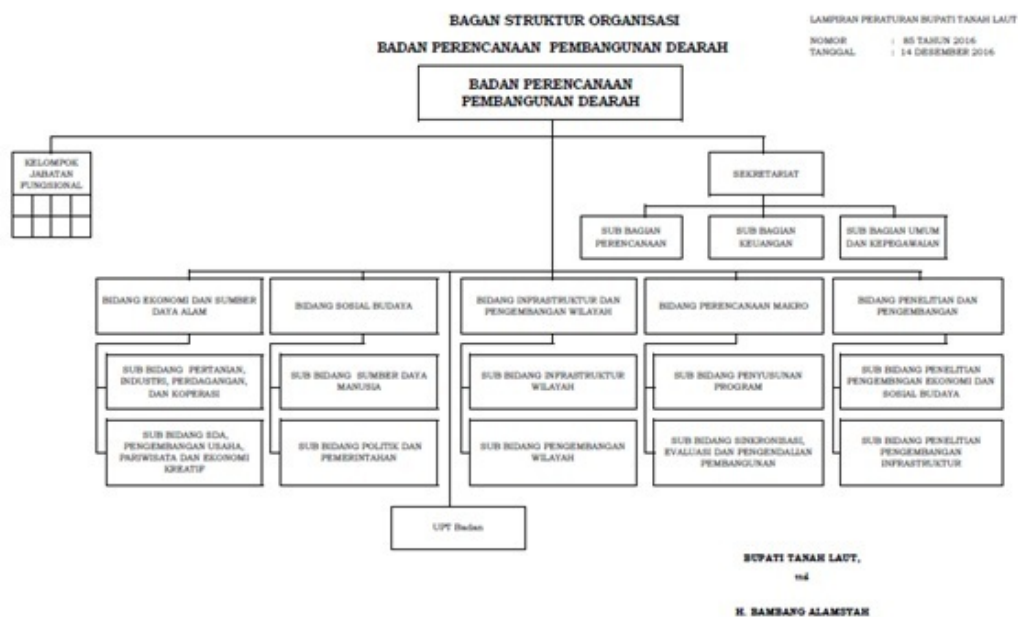
Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK BAPPEDA dapat dilihat pada bagan berikut :



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas Kepala sebanyak 1 orang, Sekretaris sebanyak 1 orang, Kepala Bidang 5 orang, Kepala Sub Bagian 3 orang, Kepala Sub Bidang 10 orang, pejabat fungsional sebanyak 1 orang dan Staf/pelaksana sebanyak 14 orang.

Susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh satu orang Sekretaris bereselon IIIa yang dibantu oleh sekretariat yang didalamnya terdapat 3 orang Kepala Sub Bagian bereselon IVa.

Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Selain dibantu oleh Sekretariat, Kepala Badan juga dibantu oleh bidang-bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang dengan eselon IIIb. Para Kepala Bidang dibantu oleh masing-masing 2 Kepala Sub Bidang bereselon IVa. Adapun bidang-bidang dan sub bidang yang membantu Kepala Bappeda terdiri dari :

- a. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan.
- b. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..
- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Infrastruktur.
- e. Bidang Perencanaan Makro terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program; dan
 - 2) Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain adanya sekretariat, Sub bagian, bidang dan sub bidang, pada Bappeda juga terdapat kelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Bappeda.

Struktur organisasi sifatnya statis, dalam arti tidak bisa berfungsi apabila tidak ada sumber daya manusia sebagai penggerakannya. Terkait dengan sumber daya manusia yang ada di Bappeda dapat dilihat pada data berikut :

1.	Kepala Bappeda	: 1	Orang
2.	Sekretaris Bappeda	: 1	Orang
3.	Kepala Bidang	: 5	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	: 3	Orang
5.	Kepala Sub Bidang	: 10	Orang
6.	Fungsional Perencana, Pengendali	: 1	Orang
7.	Dampak Lingkungan		
	Staf/Pelaksana	: 14	Orang
	Jumlah	: 35	Orang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pegawai/ASN pada Bappeda Tanah Laut berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

Adapun kualifikasi Pendidikan dari para ASN Bappeda disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	0	0	0
3.	SMA	5	0	5
4.	D3	3	0	3
5.	S1	18	2	20
6.	S2	7	0	7
	Jumlah	33	2	35

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina TK. I	IV/b	2 orang
2.	Pembina	IV/a	3 Orang
3.	Penata TK. I	III/d	7 Orang
4.	Penata	III/c	6 Orang
5.	Penata Muda TK. I	III/b	7 Orang

6.	Penata Muda	III/a	5Orang
7.	Pengatur TK. I	II/d	2 orang
8.	Pengatur	II/c	3 Orang
	Jumlah	-	35 Orang

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Bappeda KabupatenTanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jabatan	Struktural	Fungsional
1.	Kepala Bappeda	1 Orang	-
2.	Sekretaris Bappeda	1 Orang	-
3.	Kepala Bidang	5 Orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang	-
5.	Kepala Sub Bidang	10 Orang	-
6.	Pejabat fungsional perencana & pengendali dampak lingkungan	-	1 orang
	Jumlah	20 Orang	1 orang

2. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Bappeda Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penelitian pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pembinaan UPT Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Produk dan Layanan

Terkait dengan Produk dan Layanan Bappeda tidak terlepas dari Tugas Dan Fungsi Bappeda yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Bab II tentang tentang Kedudukan dan dan Susunan Organisasi, pada Bagian Kesatu tentang Kedudukan disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa ada 2 core bussines Bappeda yaitu Perencanaan dan Penelitian. Dengan melihat kepada 2 hal ini maka Produk dan Layanan Bappeda adalah :

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ;
4. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Dari hasil layanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda tersebut diharapkan akan dihasilkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan dihasilkannya kajian-kajian sebagai wujud dilaksanakannya penelitian dan pengembangan untuk kemajuan daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Renstra SKPD. Sebagai sebuah SKPD, Bappeda berupaya mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” yang merupakan akronim dari Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang menyatakan bahwa Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan, maka Bappeda mempunyai peran penting dalam mewujudkan Misi ke 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu : **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”**.

C. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD. Tujuan harus dirumuskan spesifik, realistis, dan dilengkapi dengan sasaran yang terukur serta dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian

kinerja atas indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Rumusan tujuan sebagaimana Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja.
2. Terwujudnya Tata kelolanya administrasi perkantoran

D. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan.
3. Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD
5. Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan
6. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sosbud.
7. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya.
8. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.
9. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.
10. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
11. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
12. Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah.
13. Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD
14. Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD

Penjabaran tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja daerah	Jumlah nilai komponen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah/AKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja)	61,5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian	Penyusunan standar pengendalian yang akuntabel
				Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
			Meningkatkan capaian/target perencanaan pembangunan	Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja	Penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel
			Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
				Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan	Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial
			Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD	Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi Kinerja SKPD lingkup Kabupaten.	Peningkatan koordinasi dengan SKPD se Kabupaten.

			Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan	Meningkatkan kesesuaian indikator program dan kegiatan dengan sasaran pembangunan.	Penajaman indikator program dan kegiatan dengan sasaran pembangunan
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sospud	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kinerja pembangunan SKPD lingkup bidang Sosial Budaya.	Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kinerja pembangunan SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA	Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kinerja pembangunan SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
Terwujudnya Tata kelolanya adminstrasi perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD	77			
			Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD	Meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyusunan, Pengolahan dan Penyajian data umum dan kepegawaian	Memaksimalkan pemanfaatan Teknologi informasi terkait penyusunan, Pengolahan dan Penyajian data umum dan kepegawaian
			Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD	Meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan, keuangan dan Pelaporan.	Memaksimalkan pemanfaatan Teknologi informasi yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

E. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.

Berkenaan dengan keterkaitan antara Tujuan dan indikatornya, Sasaran dan Indikatornya selama 5 Tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tran sisi 2018	Target Kinerja				
							Tahun ke – (%)				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Target Tujuan					
	Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja daerah	Jumlah nilai komponen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah/AKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja)	61,5			47,6	58,7	59,4	60,1	60,8	61,5
						Target Sasaran					
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP dan RPJMN (aturan)	70	80	90	90	90	90
				Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan	Persentase capaian realisasi program pembangunan	70	80	80	90	90	90
				Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian	Persentase hasil kajian/penelitian yang dapat dapat dituangkan dalam pembangunan	70	80	80	90	90	90
				Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD	Persentase program SKPD sesuai dengan sasaran renstra dan RPJMD	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan	Persentase SKPD yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70	70	80	80	90	90

				Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sosbud	Persentase Capaian Kineja SKPD Lingkup Bidang Sosial budaya	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase SKPD lingkup Bidang Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	80	80	90	90	90

	Terwujudnya Tata kelolanya adminstrasi perkantoran	nilai akuntabilitas kinerja SKPD	77			74	74	75	76	76	77
				Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD	Peresentase kelancaran urusan umum dan kepegawaian	70	70	80	80	90	90
				Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD	Nilai Sakip SKPD	74	74	75	76	76	77

F. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan order dari pimpinan daerah kepada sebuah SKPD. IKU merupakan locator dimana SKPD tersebut harus berkiprah dan memberikan andilnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dari IKU ini pula dapat diketahui core bussines sebuah SKPD. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut tahun 2019 telah ditetapkan adanya 3 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya capaian/target perencanaan pembangunan.
3. Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

Secara lebih khusus, indikator kinerja utama akan dibahas pada bab III laporan ini.

G. Program dan Kegiatan

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Anggaran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	210.402.750,-
2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	3.090.000,-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.246.700,-
4	Penyediaan alat tulis kantor	35.861.800,-
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.950.500,-
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.243.900,-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.258.000,-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.904.000,-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	46.350.000,-
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.179.750.000,-
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	62.861.000,-
12	Penyediaan jasa penunjang kinerja skpd	272.521.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	70.000.000,-
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	221.140.000,-
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139.510.000,-
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	47.880.000,-
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	20.000.000,-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.985.100,-
4	Program PenelitiandanPengembangan	
1	Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Bidang	205.559.700,-

	Ekonomi dan Sosial Budaya	
2	Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	478.762.050,-
5	Program Pengembangan Perumahan	
1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	278.220.300,-
6	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	160.250.000,-
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh	
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh	350.918.550,-
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	230.289.950,-
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Penetapan RPJMD	55.338.000,-
2	Penyelenggaraan musrenbang rkpd	629.133.700,-
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	92.032.700,-
4	Pengendalian Pelaksanaan dan aAlokasi Khusus	21.933.600,-
5	Penanggulangan kemiskinan daerah	184.808.500,-
6	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	9.999.500,-
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
1	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	121.390.000,-
2	Pengembangan Usaha Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kreatif	98.992.200,-
3	Koordinasi perencanaan pengembangan kawasan industri	26.018.850,-
11	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial Budaya	56.558.100,-

H. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sertasumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka Bappeda juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2019. Perjanjian Kinerja ditanda tangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Eselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, Bappeda juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub bagian/bidang (Eselon IV) dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan format pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian atas kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada masing-masing bidang, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai tahun 2018. Secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kunci tersebut dapat diuraikan pada lampiran.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Bappeda Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut tahun 2019 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan;

2. Target Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Instansi Bappeda Kabupaten Tanah Laut, target IKU yang harus dicapai dapat dilihat pada Tabel berikut :

Target Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kab. Tanah Laut Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP, RPJMN/aturan	80%

2.	Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan	Persentase capaian realisasi program pembangunan	80%
3.	Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase hasil kajian/penelitian yang dapat dituangkan dalam pembangunan	80%

3. Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dengan indikator persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP, RPJMN/aturan.

Pada tahun 2018 Bappeda Tanah Laut telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen perencanaan SKPD sebanyak 40 SKPD yang didukung dengan Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan anggaran Rp799.729.200,- realisasi sebesar Rp707.164.600,- (80,4%)

Sedangkan tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut juga melakukan evaluasi terhadap Dokumen perencanaan SKPD sebanyak 40 SKPD yang didukung dengan Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan anggaran Rp629.133.720,- realisasi sebesar Rp338.367.800,- (53,78%).

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP, RPJMN/aturan	80%	100%

Berdasarkan table diatas Bappeda telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap keselarasan program dan kegiatan yang ada direnstra 40 SKPD beserta UPTD-UPTD dibawahnya.

Dari hasil kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap keselarasan program dan kegiatan yang ada direnstra 40 SKPD terdapat 584 program yang telah sesuai dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi dan memverifikasi keselarasan program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan Desk oleh Pokja-Pokja yang ada di BAPPEDA dengan SKPD terkait untuk menjamin kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Renstra & Renja SKPD;
- b. Melaksanakan Sosialisasi terkait penyusunan Renstra SKPD dengan narasumber dari Bappenas;
- c. Melakukan penginputan ke system perencanaan berbasis teknologi informasi (e-planning) dengan menyelaraskan Tujuan, Indikator Tujuan dan Target, Sasaran Indikator Sarasan dan Target serta Program dan kegiatan sampai kepada output dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Adapun Kendala- kendala yang dihadapi dalam melakukan evaluasi dan verifikasi ini antara lain :

- a. Jaringan internet yang kurang support.
 - b. Lambatnya SKPD dalam melakukan pengimputan ke Sistem;
- Sedangkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :
- a. Menambah bandwith jaringan internet.
 - b. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatkan capaian / target perencanaan pembangunan dengan indikator Persentase capaian realisasi program pembangunan.

Pada tahun 2018 Bappeda Tanah Laut telah melakukan evaluasi terhadap capaian/ target perencanaan pembangunan yang didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan dengan Pagu anggaran Rp99.885.200,- realisasi sebesar Rp20.541.200,- (20,5%)

Sedangkan tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut juga melakukan evaluasi terhadap capaian/ target perencanaan pembangunan dengan anggaran Rp92.032.700,- realisasi sebesar Rp28.192.600,- (30,63%)

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5

1.	Meningkatkan capaian / target perencanaan pembangunan	Persentase capaian realisasi program pembangunan	80%	100%
----	---	--	-----	------

Untuk mencapai indikator ini Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan Monev terhadap serapan keuangan dan capaian fisik seluruh SKPD yang dilaksanakan setiap Triwulan. Monev ini dimaksudkan untuk melihat serapan dan realisasi fisik kegiatan di masing-masing SKPD.

Sasaran 3 : Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan dengan Indikator Persentase hasil kajian / penelitian yang dapat dituangkan dalam pembangunan.

Pada tahun 2018 Bappeda Tanah Laut telah melakukan penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan dengan Program pengembangan data/Informasi kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran Rp346.589.500,- yang pada APBD perubahan 2018 berkurang menjadi sebesar Rp288.959.500,- dengan realisasi Rp226.532.250,- atau sekitar (78%).

Sedangkan tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut juga melakukan penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan dengan Program Penelitian dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan social budaya & Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dengan anggaran Rp684.321.750,- realisasi sebesar Rp213.936.800,- (31,26%)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase hasil kajian/penelitian yang dapat dituangkan dalam pembangunan	80%	100%

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator

Pada Tahun 2019 Bappeda Kabupaten tanah Laut telah melakukan Kajian yaitu :

1. Kajian Efektifitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut,
2. Kajian Pengembangan Objek Wisata Religius Pulau Datu Desa Tanjung Dewa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari kedua kajian tersebut di atas dapat ditindak lanjuti dan dapat dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Bappeda Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018-2023 telah menetapkan 14 sasaran strategis terdiri atas 3 sasaran IKU Eselon II dan 11 sasaran strategis sekretariat dan bidang-bidang. Laporan Kinerja Bappeda untuk tahun anggaran 2019 adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

1. Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target.

Capaian sasaran strategis yang telah dirumuskan Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target Bappeda Kab. Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP, RPJMN/aturan	80%	100%
2.	Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan	Persentase capaian realisasi program pembangunan	80%	100%
3.	Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase hasil kajian/penelitian yang dapat dituangkan dalam pembangunan	80%	100%
4.	Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD	Persentase program SKPD sesuai dengan sasaran renstra dan RPJMD	70%	100%
5.	Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan	Persentase SKPD yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%	100%

6.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sosial budaya	Persentase Capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial budaya	70%	100%
7.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%	100%
8.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	70%	100%
9.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%	100%
10.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	70%	100%
11.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase SKPD lingkup Bidang Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%	100%
12.	Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	100%
13.	Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD	Persentase kelancaran urusan umum dan kepegawaian	80%	100%
14.	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD	Nilai Sakip SKPD	74	74

2. Uraian Capaian Sasaran Sesuai Misi

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut juga melakukan evaluasi terhadap Dokumen perencanaan SKPD sebanyak 40 SKPD yang didukung dengan Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan anggaran Rp629.133.720,- realisasi sebesar Rp338.367.800,- (53,78%) Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP, RPJMN/aturan	80%	100%

Dari hasil kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap keselarasan program dan kegiatan yang ada direnstra SKPD 40 terdapat 584 program yang telah sesuai dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, sehingga capaian tersebut terealisasi 100%.

Perencanaan Pembangunan Daerah sangat erat kaitannya dengan dokumen perencanaan yaitu dokumen RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Tahun 2005-2025, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Tahun 2018-2023 yang berorientasi pada target sehubungan dengan tugas dan fungsi Bappeda, Renja (Rencana Kerja) Bappeda yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun dan mengacu pada Renstra Bappeda, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sasaran 2 : Meningkatkan capaian / target perencanaan pembangunan dengan indikator Persentase capaian realisasi program pembangunan.

Pada tahun 2018 Bappeda Tanah Laut telah melakukan evaluasi terhadap capaian/target perencanaan pembangunan yang didukung dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan dengan Pagu anggaran Rp99.885.200,- realisasi sebesar Rp20.541.200,- (20,5%)

Sedangkan tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut juga melakukan evaluasi terhadap capaian/ target perencanaan pembangunan dengan anggaran Rp92.032.700,- realisasi sebesar Rp28.192.600,- (30,63%)

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5

1.	Meningkatkan capaian / target perencanaan pembangunan	Persentase capaian realisasi program pembangunan	80%	90,9%
----	---	--	-----	-------

Untuk mencapai indikator ini Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan Monev terhadap serapan keuangan dan capaian fisik seluruh SKPD yang dilaksanakan setiap Triwulan. Monev ini dimaksudkan untuk melihat serapan dan realisasi fisik kegiatan di masing-masing SKPD.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tahun 2019 didapatkan hasil kinerja pembangunan daerah sebesar **90,9%** (laporan monitoring dan evaluasi yang didapatkan dari aplikasi e-monev.

Dalam rangka pengendalian suatu program dan peningkatan kinerja pembangunan daerah perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah program kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut sudah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi dan menemukan solusi atas masalah yang timbul selama periode evaluasi sehingga dapat diatasi untuk periode berikutnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Bappeda Kab. Tanah Laut menyusun kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan setiap tahunnya agar dapat melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah dengan baik dan mengetahui capaian kinerja SKPD

Sasaran 3 : Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan dengan Indikator Persentase hasil kajian / penelitian yang dapat dituangkan dalam pembangunan.

Pada tahun 2018 Bappeda Tanah Laut telah melakukan penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan dengan Program pengembangan data/Informasi kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran Rp346.589.500,- yang pada APBD perubahan 2018 berkurang menjadi sebesar Rp288.959.500 dengan realisasi Rp226.532.250,- atau

sekitar (78%).

Sedangkan tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut juga melakukan penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan dengan Program Penelitian dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan social budaya & Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dengan anggaran Rp684.321.750,- realisasi sebesar Rp213.936.800,- (31,26%)

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator.

1	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase hasil kajian/penelitian yang dapat dituangkan dalam pembangunan	80%	100%

Dari kedua kajian tersebut di atas dapat ditindak lanjuti dan dapat dituangkan dalam perencanaan pembangunan sehingga capaian tersebut mencapai 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD dengan Indikator Persentase program SKPD sesuai dengan Sasaran Renstra dan RPJMD.

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan anggaran sebesar Rp629.133.700,- terealisasi sebesar Rp338.367.800,- (53,78%)

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD dengan	Persentase program SKPD sesuai dengan Sasaran Renstra dan RPJMD	70%	100%

Pada Tahun 2019 untuk mencapai Sasaran tersebut Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan yang dilakukan Bappeda bersama 11 Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini untuk menyepakati prioritas usulan desa-desa yang sebelumnya sudah dirumuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Forum SKPD yang dilakukan oleh antara Bappeda dengan SKPD se Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini untuk menyampaikan usulan-usulan prioritas kecamatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD.
3. Musrenbang Kabupaten yang dilakukan untuk menyepakati kegiatan-kegiatan yang dapat diakomodir SKPD dengan berbagai sumber penganggaran baik dari APBD, dari dana DAK dan sumber-sumber lainnya.

Dari hasil Musrenbang inilah di dapat Indikator Persentase program SKPD sesuai dengan Sasaran Renstra dan RPJMD yang tergambar dari jumlah usulan yang adapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah. Pada tingkat musyawarah ini telah dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan usulan kegiatan antara SKPD dengan Bappeda. Dari hasil pengendalian perencanaan ini SKPD telah terealisasi 100%.

Sasaran 5 : Meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan dengan Indikator Persentase SKPD yang perencanaannya selaras dengan RPJMD.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp9.999.500,- terealisasi sebesar Rp7.665.000,- (76,65%). Dalam kegiatan ini dilaksanakan rapat koordinasi bersama 40 SKPD untuk bisa memastikan bahwa Renstra yang disusun SKPD telah mengindahkan

ketentuan dan target-target yang dituangkan dalam RPJMD. Kehadiran SKPD pada rapat koordinasi yang dilaksanakan Bappeda selalu 100 persen dihadiri oleh SKPD. Meskipun kehadiran SKPD pada rapat koordinasi senantiasa dihadiri oleh Semua SKPD, hal ini memang belum menjamin selarasnya penyusunan renstra dengan RPJMD, tetapi upaya ke arah semakin selarasnya penyusunan renstra dengan RPJMD merupakan indikasi yang baik bagi semakin meningkatnya kualitas perencanaan SKPD dan semakin selarasnya Renstra SKPD dengan RPJMD.

Sasaran 6 : Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sosbud dengan Indikator Persentase Capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial budaya.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program perencanaan sosial dan budaya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan anggaran sebesar Rp56.558.100,- terealisasi sebesar Rp36.222.200,- (64,04%)

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sosbud.	Persentase Capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial budaya	80%	100%

Pada Tahun 2019 untuk mencapai Sasaran tersebut Bappeda Kabupaten Tanah Laut pada Bidang Sosbud melaksanakan monitoring ke lapangan terkait kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD lingkup bidang sosial budaya. Pendanaan dari kegiatan monev ini telah dianggarkan dan melekat pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya.

Dari hasil pelaksanaan monev tersebut, Indikator Persentase Capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya telah sesuai dengan program / kegiatan masing-masing

SKPD. Dari hasil kegiatan tersebut dapat dikatakan bahwa pengendalian perencanaan SKPD telah terealisasi 100%.

Sasaran 7 : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial Budaya dengan Indikator Persentase SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya yang perencanaannya selaras dengan RPJMD.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program perencanaan sosial dan budaya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dengan anggaran sebesar Rp56.558.100,- terealisasi sebesar Rp36.222.200,- (64,04%).

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk melakukan verifikasi terhadap indikator program dan kegiatan dari SKPD yang diampu oleh bidang sosial budaya.

Dari ke 10 SKPD beserta UPTDnya dapat diketahui bahwa semua SKPD tersebut telah terverifikasi renjanya selaras dengan RPJMD. Dengan dasar itulah maka dapat dikatakan capaian Persentase SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya yang perencanaannya selaras dengan RPJMD adalah 100 persen sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial Budaya	Persentase SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya yang perencanaannya selaras dengan RPJMD.	80%	100%

Sasaran 8 : Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA dengan Indikator Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA.

Untuk mencapai sasaran ini, di tahun 2019 telah dilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi

dengan anggaran sebesar Rp121.390.000,- terealisasi sebesar Rp21.335.000,- (17,58%).

Untuk mencapai Sasaran tersebut Bappeda Kabupaten Tanah Laut pada Bidang Ekonomi dan SDA melaksanakan monitoring ke lapangan terkait kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA. Pendanaan dari kegiatan monev ini telah dianggarkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi dan SDA.

Dari hasil pelaksanaan monev tersebut, Indikator Persentase Capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA telah sesuai dengan program / kegiatan masing-masing SKPD. Dari hasil kegiatan tersebut dapat dikatakan bahwa pengendalian perencanaan SKPD telah terealisasi 100%.

Sasaran 9 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA dengan Indikator Persentase SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA yang perencanaannya selaras dengan RPJMD.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi kegiatan Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi dengan anggaran sebesar Rp121.390.000,- terealisasi sebesar Rp21.335.000,- (17,58%).

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk melakukan verifikasi terhadap indikator program dan kegiatan dari SKPD yang diampu oleh bidang sosial budaya.

Dari ke 9 SKPD tersebut dapat diketahui bahwa semua SKPD tersebut telah terverifikasi renjanya selaras dengan RPJMD. Dengan dasar itulah maka dapat dikatakan capaian Persentase SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA yang perencanaannya selaras dengan RPJMD adalah 100 persen sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5

1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA yang perencanaannya selaras dengan RPJMD.	80%	100%
----	--	--	-----	------

Sasaran 10 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Indikator Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan anggaran sebesar Rp350.918.550,- terealisasi sebesar Rp311.780.900,- (88,85%).

Pada kegiatan ini terdapat anggaran untuk melaksanakan monitoring ke lapangan terkait kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Dari hasil pelaksanaan monev tersebut, meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Indikator Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah telah sesuai dengan program / kegiatan masing-masing SKPD. Dari hasil kegiatan tersebut dapat dikatakan bahwa pengendalian perencanaan SKPD telah terealisasi 100%.

Sasaran 11 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Indikator Persentase SKPD lingkup Bidang Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang perencanaannya selaras dengan RPJMD.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program lingkungan sehat Perumahan dan program pengembangan perumahan kegiatan

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan & Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan anggaran sebesar Rp320.222.300,- terealisasi sebesar Rp305.898.900,- (95,52%).

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk melakukan verifikasi terhadap indikator program dan kegiatan dari SKPD yang diampu oleh bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa semua SKPD tersebut telah terverifikasi renjanya selaras dengan RPJMD. Dengan dasar itulah maka dapat dikatakan capaian Persentase SKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang perencanaannya selaras dengan RPJMD adalah 100 persen sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Persentase SKPD lingkup Bidang Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	80%	100%

Sasaran 12 : Meningkatkan implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah dengan Indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program penelitian dan pengembangan dengan 2 kegiatan yaitu :

1. kegiatan Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya dengan anggaran sebesar Rp205.559.700,- terealisasi sebesar Rp159.184.200,- (77,44%)

2. Kegiatan Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp478.762.050,- terealisasi sebesar Rp54.752.600,- (11,44%)

Kedua kegiatan ini telah menghasilkan 2 buah kajian yang kedua direncanakan akan segera diimplementasikan untuk dituangkan dalam kegiatan pembangunan di masa mendatang. Adapun 2 kajian yang telah dihasilkan pada tahun 2019 tersebut yaitu :

1. Kajian Efektifitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut. Adapun anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp82.690.400,-. Untuk meningkatkan pendapatan pajak sarang burung pemerintah daerah dapat melakukan upaya optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah terutama pajak sarang burung walet. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian sanksi tegas terhadap para wajib pajak yang tidak mentaati peraturan pajak yang berlaku. Melihat potensi penerimaan pajak sarang burung walet yang masih minim (under estimate) berdasarkan data populasi bangunan sarang burung walet sampai akhir tahun 2019 yang cukup besar, maka pemuktahiran data bangunan walet wajib dilaksanakan.
2. Kajian Pengembangan Objek Wisata Religius Pulau Datu Desa Tanjung Dewa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Adapun anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp82.690.400,-. Pengembangan objek wisata Pulau Datu harus mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development), ditangani secara lintas sektor (intersektoral) dan Holistik, serta berbasis masyarakat (community based tourism development) dengan pelibatan beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rencana aksi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Dengan melihat kepada telah dihasilkannya kajian-kajian diatas dan akan diterapkan pada tahun 2020 maka dapat dikatakan bahwa pencapaian target sasaran strategis meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah persentase penelitian dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai 100% sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	100%

Sasaran 13 : Meningkatkan kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD dengan Indikator Persentase kelancaran urusan umum dan kepegawaian.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui 3 Program yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp210.402.750,- terealisasi sebesar Rp128.661.422,- (61,15%)
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp3.090.000,- terealisasi sebesar Rp1.332.000,- (43,11%)
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp4.246.700,- terealisasi sebesar Rp3.137.000,- (73,87%)
 - d. Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp35.861.800 terealisasi sebesar Rp32.137.900,- (89,62%)
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp20.950.500,- terealisasi sebesar Rp18.930.500,- (90,36%)
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp34.243.900,- terealisasi sebesar Rp9.725.000,- (28,40%)
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp33.258.000,- terealisasi sebesar Rp23.353.000,- (70,22%)
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp2.904.000,- terealisasi sebesar Rp2.904.000,- (100%)
 - i. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp46.350.000,- terealisasi sebesar Rp38.097.500,- (82,20%)

- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp1.179.750.000,- terealisasi sebesar Rp1.179.750.000,- (100%)
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp62.861.000,- terealisasi sebesar Rp62.490.000,- (99,41%)
 - l. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp272.521.000,- terealisasi sebesar Rp266.776.944,- (97,89%)
2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur yaitu dengan kegiatan :
- a. pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,- terealisasi sebesar Rp64.000.000,- (91,43%)
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp221.140.000,- terealisasi sebesar Rp195.905.250,- (88,59%)
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp139.510.000,- terealisasi sebesar Rp71.992.871,- (51,60%)
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp47.880.000,- terealisasi sebesar Rp12.583.000,- (26,28%)
 - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,- terealisasi sebesar Rp18.695.000,- (93,48%)
3. Program kerjasama Informasi dengan mas media yaitu dengan kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp160.250.000,- terealisasi sebesar Rp38.881.400,- (22,74%)

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kebutuhan operasional Organisasi, maka pada tahun 2019 Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan operasional organisasi Bappeda dengan baik dengan relisasi fisik sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
 - Penyediaan Jasa administrasi keuangan dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan realisasi fisik kegiatan sebesar

100%.

- Penyediaan alat tulis kantor dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Penyedia jasa penunjang kinerja SKPD dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantordengan realisasi fisik kegiatan sebesar 91,43%.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya kelancaran	Persentase kelancaran	80	100

pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD	urusan umum dan kepegawaian		
---	-----------------------------	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Sekretariat Bappeda telah dapat merealisasi pencapaian sasaran strategi Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD dengan indikator Persentase kelancaran urusan umum dan kepegawaian dari target Renstra sebesar 80 persen terelisasi sebesar 100 persen atau jika dilihat dari persentasinya melebihi target yaitu 125 persen target Renstra.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung kelancaran urusan umum dan kepegawaian meliputi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah, penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD, pengadaan kendaraan dinas/ operasional, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Peralatan Gedung kantor berupa papan data kepegawaian, papan pengumuman, laptop, printer multi fungsi printer injek, pc computer all in one, ac split, mixer amplifier, TV LCD, LCD proyektor, sofa, Kursi tangan (kursi kerja) dan meja kerja.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yaitu pemeliharaan perlengkapan kantor/kerja yang terdiri dari pemeliharaan computer, laptop/notebook, printer, AC, standing AC, Server, Cctv,

dan pemeliharaan Genset. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor berupa rehab pelapon/atap dan rehab parkir.

- 4) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik keluar daerah maupun di dalam daerah.

Sasaran 14 : Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD dengan Indikator Nilai Sakip SKPD.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD anggaran sebesar Rp10.985.100,- terealisasi sebesar Rp2.441.000,- (22%)

Nilai capaian sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD	Nilai Sakip SKPD	74 (BB)	... ()

Hasil evaluasi SAKIP Bappeda Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 mencapai nilai 63,60 (BB) sedangkan untuk Tahun 2019 masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tabel nilai Sakip Bappeda

Tahun	Nilai	Katagori
2019
2018	63,60	B
2017	60,07	B
2016	59,22	C

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.985.100 terealisasi sebesar Rp7.870.000,- atau 71,64%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu nilai SAKIP.

Tahun 2019 Target predikat SAKIP adalah BB, sesuai hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah “B” dengan nilai 70 .

Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi 5 komponen.

- a) Perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
- b) Pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi Pelaporan kinerja
- c) Pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerjaSedangkan
- d) Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi,
- e) Untuk pencapaian kinerja, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya

Kendala dalam melakukan pencapaian indikator ini antara lain :

1. Pengumpulan Data kinerja dari Bidang yang agak terlambat.
2. Kurangnya pemahaman SDM penyusun Laporan;

Solusi yang dilakukan antara lain :

1. Koordinasi yang lebih baik dengan Bidang-Bidang;
2. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja;
3. Menunjuk petugas pengumpul data kinerja;
4. Mengikut sertakan Bimtek penyusunan SAKIP bila ada kesempatan.

C. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program kegiatan pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis yang telah dibuat sesuai dengan Renstra Tahun 2013-2018. Realisasi capaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Table REALISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	ESELON 2			2019
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD, RPJMP dan RPJMN (aturan)	80	100
	Meningkatkan capaian/ target perencanaan pembangunan	Persentase capaian realisasi program pembangunan	80	100
	Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian	Persentase hasil kajian/penelitian yang dapat dapat dituangkan dalam pembangunan	80	100
	ESELON 3			
1	Meningkatnya pengendalian perencanaan SKPD	Persentase program SKPD sesuai dengan sasaran renstra dan RPJMD	70	100
2	Meningkatnya keselarasan perencanaan SKPD terhadap capaian pembangunan	Persentase SKPD yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70	100
3	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Bidang Sosbud	Persentase Capaian Kineja SKPD Lingkup Bidang Sosial budaya	70	100
4	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Persentase SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70	100
5	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	70	100
6	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Persentase SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA yang perencanaannya selaras dengan RPJMD	70	100
7	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase capaian kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	70	100
8	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup	Persentase SKPD lingkup Bidang Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang perencanaannya selaras dengan	70	100

	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	RPJMD		
9	Meningkatnya implementasi hasil kajian Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100
	ESELON 3 (SEKRETARIS)			
10	Meningkatnya kelancaran pengelolaan, urusan umum dan kepegawaian SKPD	Peresentase kelancaran urusan umum dan kepegawaian	80	100
11	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD	Nilai Sakip SKPD	74	...
	ESELON 4 (SEKRETARIAT)			
12	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Laporan keuangan akhir tahun (CALK) 2. Jumlah laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Keuangan Bulanan (Bend. Pengeluaran) 3. Jumlah laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Asset/ Barang 4. laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Pajak Bulanan 5. laporan capaian Kinerja Berupa Laporan Kinerja Bulanan	5 buku 24 buku 12 Buku 36 Buku 36 Buku	5 buku 24 buku 12 Buku 36 Buku 36 Buku
13	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1. Tersampainya informasi terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan 2. Terlaksananya pengembangan website Bappeda Tanah laut 3. Terlaksananya pengadaan sistem informasi internal	12 Bulan 1 Paket 1 Paket	12 Bulan 1 Paket 0 Paket
14	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah rekening jasa telpon yang terbayar 2. Jumlah jasa Komunikasi yang terbayar 3. Jumlah rekening jasa air yang terbayar 4. Jumlah jasa rekening listrik yang terbayar	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
15	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1. Jumlah materai untuk memfasilitasi SPJ keuangan	1 Tahun	1 Tahun
16	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk peningkatan kebersihan dan kenyamanan kantor	1 Tahun	1 Tahun
17	Penyediaan alat tulis kantor	1. Jumlah alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun
18	Penyediaan barang	1. Jumlah bahan pencetakan dan	1 Tahun	1 Tahun

	cetakan dan penggandaan	penggandaan		
19	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1. Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun
20	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. Jumlah Terlaksananya penyediaan kelengkapan komputer, spanduk, bendera dan kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun
21	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1. Jumlah Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	1 Tahun	1 Tahun
22	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah notulen/ kesepakatan hasil rapat	1 Tahun	1 Tahun
23	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. koordinasi ke luar daerah (dalam dan luar provinsi)	1 Tahun	1 Tahun
24	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	1. koordinasi dan konsultasi dalam daerah (kecamatan)	1 Tahun	1 Tahun
25	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	1. Honorarium Pegawai Honorer (PTT)	14 orang	14 orang
26	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas bermotor operasional roda 2 (kend trail)	2 buah	2 buah
27	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terleksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa: 1. Papan data kepegawaian 2. Papan pengumuman 3. laptop 4. printer multifunction 5. printer inkjet 6. Pc all in one 7. Ac split 8. Mixer amplifier 9. Tv LCD 10. LCD projector 11. Sofa 12. Kursi tangan (kursi meja) 13. Meja kerja	1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 3 buah 4 buah 3 buah 1 set 2 buah 1 buah 1 set 5 buah 5 buah	1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 3 buah 4 buah 3 buah 1 set 2 buah 1 buah 1 set 5 buah 5 buah
28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1. Terlaksananya perawatan kendaraan dinas, pembelian BBM dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda 2 2. Terlaksananya perawatan kendaraan dinas, pembelian BBM dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda 4	13 unit 4 unit	13 unit 4 unit
29	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1. Terlaksananya perbaikan peralatan gedung kantor berupa komputer/ laptop/ notebook/ printer, AC, server, genset, solar cell dan CCTV	1 tahun	1 tahun
30	Rehabilitasi	1. Terlaksananya Rehabilitasi	12 bulan	12 bulan

	sedang/berat gedung kantor	sedang berat gedung kantor		
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta review LAKIP 2. Jumlah peserta review penyusunan SDGs 3. Jumlah peserta review Peningkatan IPM 4. Jumlah peserta review Penurunan Kemiskinan 5. Jumlah peserta review Peningkatan Inovasi daerah 6. Jumlah terikutinya bimtek, workshop dan sejenisnya 	51 Pegawai Bappada 49 Aparatur 49 Aparatur 49 Aparatur 49 Aparatur 51 Aparatur untuk bimtek, workshop/sejenisnya	51 Pegawai Bappada 49 Aparatur 0 Aparatur 0 Aparatur 0 Aparatur 51 Aparatur untuk bimtek, workshop/s sejenisnya
	ESELON 4 (litbang)			
31	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya	1. Penyusunan Kajian Struktur Kemiskinan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
32	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1. Kajian Kebutuhan Kelitbangan Daerah pada Kab. Tanah Laut	1 Dokumen	1 Dokumen
	ESELON 4 (makro)			
33	Pengendalian pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan DAK yang tersusun 2. Jumlah rapat DAK yang dilaksanakan 3. Jumlah Usulan DAK Tahun 2020 	4 Dokumen 4 Kali 15 Bidang DAK	4 Dokumen 4 Kali 15 Bidang DAK
34	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	1. Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	1 Tahun	1 Tahun
35	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2020 yang mengacu pada dokumen perencanaan dan tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Jumlah tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 sesuai ketentuan yang berlaku 	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen

36	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Jumlah rapat moneyv yang dilaksanakan	4 Kali	3 Kali
37	Penetapan RPJMD	1. Jumlah tersusunnya Draft Perda RPJMD 2018 -2023	1 Dokumen	1 Dokumen
	ESELON 4 (sosbud)			
38	penanggulangan kemiskinan daerah	1. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Tanah Laut 2. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut (3kali Rakor TKPKD,5kali Rapat Tim Teknis Penanggulangan Kemiskinan (penyusunan LP2KD),5kali Rapat Tim penyusunan SPKD) 3. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	11 Kecamatan 13 Kali 1 Dokumen	11 Kecamatan 13 Kali 1 Dokumen
39	pelaksanaan program PISEW	1. Terlaksananya fasilitasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah RISE II	1 Kecamatan KSK (jorong)	1 Kecamatan KSK (jorong)
40	Rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi	1. Jumlah laporan pelaksanaan RAD-PPK yang tersusun 2. Jumlah rumusan rapat koordinasi pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen
41	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	1. Jumlah notulen/keepakatan rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen
	ESELON 4 (ekonomi)			
	perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1. Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA 2. Fasilitasi event ekonomi market	10 kali 1 event	5 kali 0 event
	Pengembangan usaha sumber daya alam dan ekonomi kreatif	1. Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang Transisi Rencana Penutupan Tambang (RPT) 2. Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pengembangan pariwisata 3. Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Ekonomi kreatif	8 kali 8 kali 8 kali	8 kali 8 kali 8 kali
	Koordinasi perencanaan pengembangan Kawasan Industri	1. Jumlah notulen / kesepakatan hasil rapat koordinasi perencanaan pengembangan kawasan industri jorong	10 notulen/kesepakatan	10 notulen/kesepakatan
	ESELON 4 (Infrastruktur)			
	Penyusunan perencanaan pengembangan	1. Kajian Perencanaan Penataan Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan Bumi	1 Dokumen	1 Dokumen

	wilayah strategis dan cepat tumbuh	Makmur - Kurau		
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	1. Terlaksananya penyusunan masterplan penanganan kawasan kumuh Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	1. Jumlah rumusan hasil rapat koordinasi kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi nasional Kab.Tanah Laut	1 Dokumen	1 Dokumen

Dari tabel tersebut terlihat bahwa secara mendasar, capaian sasaran strategis Bappeda di tahun 2019 ini relatif sama dengan capaian di tahun 2018. Terkait dengan sasaran Meningkatnya pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan SKPD dengan indikator nilai SAKIP telah pula menunjukkan perbaikan dari yang semula tercapai nilai 73 di tahun 2018, dapat ditingkatkan menjadi 74 di tahun 2019

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019

Tahun **2019** Bappeda Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp11.443.751.809 yang terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut table belanja Tidak langsung tahun 2019 :

Tabel Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Gaji dan tunjangan	2.668.584.859,-	2.251.667.765,-	84
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.165.972.500,-	2.742.623.494,-	86
	Total	5.834.557.359,-	4.994.291.259,-	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja tidak langsung Bappeda untuk Belanja Gaji dan tunjangan mencapai angka 84 persen dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS mencapai angka serapan 86 persen.

b) Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2019 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan SKPD, yang terdiri atas 13 (Tiga belas) program yang terdiri atas 37 (Tiga puluh tujuh) kegiatan.

Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp11.443.751.809,- dengan program sebanyak atas 13 (Tiga belas) program yang terdiri atas 37 (Tiga puluh tujuh) kegiatan tersebut semua telah terealisasi.

Dari tabel 3.10 tersebut terlihat ada 2 kegiatan yang realisasinya 0 yaitu pada :

1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan Rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi. Kegiatan ini awalnya diminta untuk dilaksanakan disetiap SKPD, tapi kemudian diputuskan hanya dalam bentuk pembuatan numenklturnya saja sehingga apabila nanti akan ada dana yang perlu dianggarkan dapat dimasukkan pada numenklatur yang sudah tersedia.
2. Program perencanaan social budaya pada Kegiatan_Pelaksanaan program PISEW juga 0 rupiah karena kegiatan ini merupakan sharing untuk kegiatan dari pemerintah pusat melalui kegiatan PNPM PISEW yang sudah tidak berlanjut lagi pelaksanaannya. Pada saat penyusunan anggaran numenklatur ini juga dibuat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah pusat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bappeda telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Indeks Kinerja Utama yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, Meningkatnya capaian/target perencanaan pembangunan, dan Meningkatnya tindak lanjut hasil penelitian yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan.
2. Upaya pencapaian IKU ini dilakukan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja dari mulai Kepala Badan hingga Pejabat Eselon IV dan Individu dibawahnya.
3. Pencapaian atas kinerja yang dilaporkan dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
4. Dari Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis dapat dilihat bahwa indikator sasaran dokumen perencanaan yang berkualitas telah diverifikasi dan sudah teralisasi dengan baik, begitu juga dengan indikator sasaran persentase SKPD dengan capaian kinerja sudah banyak yang baik berdasarkan hasil e-monev. Hasil kajian yang ditindaklanjuti sebanyak 2 dokumen juga sudah tercapai.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Meningkatkan pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

4. Melakukan inventarisir terhadap hasil penelitian, kajian dan analisa serta dokumen lainnya yang relevan dari berbagai sumber yang relevan
5. Melaksanakan secara konsisten monev kinerja secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya untuk akselerasi pelaksanaan pembangunan
6. Melakukan penelitian, kajian dan analisis untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan

Demikian laporan kinerja tahun 2019 Bappeda Kabupaten Tanah Laut disampaikan. Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2020

Kepala Bappeda,



Andris Evony, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP.19790928 199711 1 001